



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

PT. BPR NGUNUT ARTA

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Ngunut Arta telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Ngunut Arta posisi 31-12-2018 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.11.910.141, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.5.857.533. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. Bank Perkredit Rakyat Ngunut Arta selanjutnya.

2 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan.
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat.
- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi Bank Perkreditan Rakyat.
- Melindungi kepentingan stakeholder



3 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR NGUNUT ARTA

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 Transparency (Keterbukaan)

- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.
- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2 Accountability

- BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola Bank Perkreditan Rakyat.
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank Perkreditan Rakyat.
- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

3 Responsibility

- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.



4 Independency

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan.
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank Perkreditan Rakyat serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban .

4 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. Bank Perkreditan Rakyat " NGUNUT ARTA" Tulungagung dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



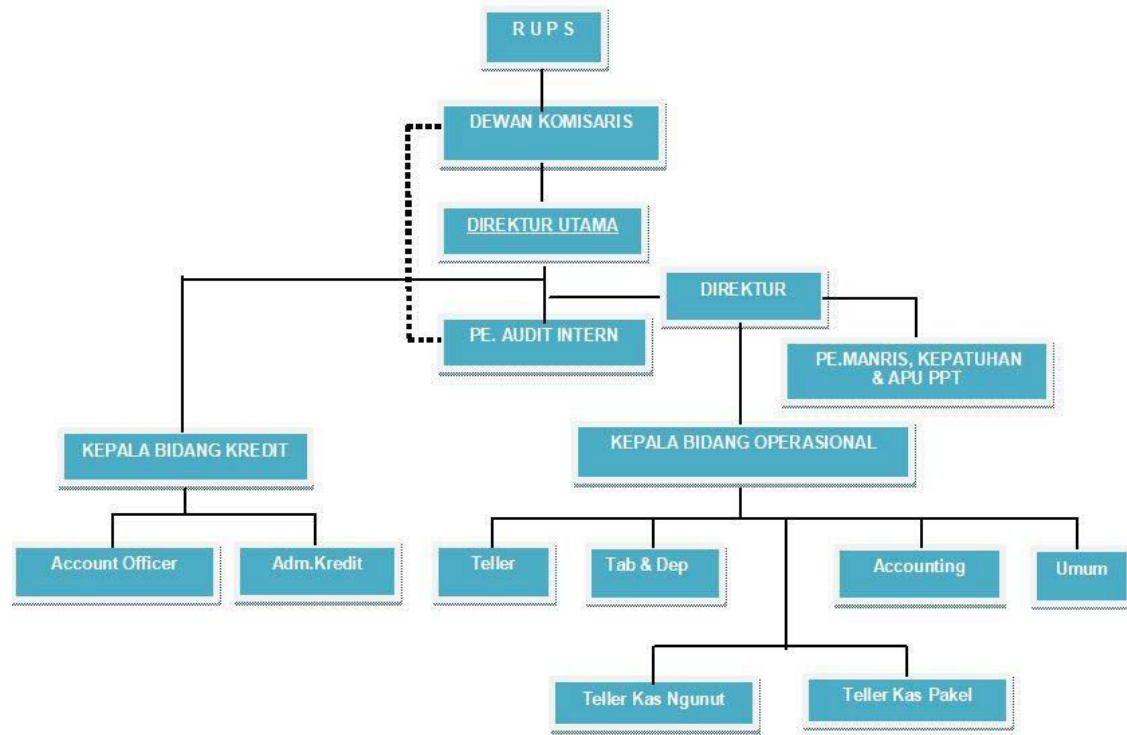
PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR NGUNUT ARTA



III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Ngunut Arta per 31-12-2018 berdasarkan AKta Perubahan Pengurus Bank Perkreditan Rakyat yang terakhir Nomor 88 tanggal 08 Nopemner 2017 pada Notaris Sri Areni SH MM adalah sebagai berikut :



| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Nama | : ANING SUNINGKAT, SE |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Tulungagung/25-11-1964 |
| Pendidikan Terakhir | : Sarjana |
| Lama Jabatan | : 21 tahun tahun |
| Sertifikasi Direksi | : 651001210632002016 |
| Masalaku | : 21-12-2021 |
| Pengalaman Kerja Terakhir | : Direktur Utama PT. BPR Ngunut Arta |



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090



| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Nama | : Dra. KUSTIANI |
| Jabatan | : Direktur |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Tulungagung/15-2-1967 |
| Pendidikan Terakhir | : Sarjana |
| Lama Jabatan | : 3 tahun tahun |
| Sertifikasi Direksi | : 65100121061582013 |
| Masalaku | : 13-2-2018 |
| Pengalaman Kerja Terakhir | : Direktur PT. BPR Ngunut Arta |

Keterangan:

Seluruh anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi. Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu Direksi bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berdasarkan surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-8/KO.0402/2017 tanggal 04-10-2017.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain



7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
3. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
4. Dengan semakin berkembangnya bisnis Bank Perkreditan Rakyat , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA posisi 31-12-2018 adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA DIREKSI | PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI | |
|----|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | PT. BPR Ngunut Arta | Tidak memiliki group usaha |
| 1 | ANING SUNINGKAT, SE | Tidak Ada | % |
| 2 | Dra. KUSTIANI | Tidak Ada | % |

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2018 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

| NO | NAMA DIREKSI | HUBUNGAN KEUANGAN | | |
|----|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | ANGGOTA DIREKSI LAIN | DEWAN KOMISARIS | PEMEGANG SAHAM BPR |
| 1 | ANING SUNINGKAT, SE | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |
| 2 | Dra. KUSTIANI | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |

**PT. BPR NGUNUT ARTA****Jalan Pahlawan No.8**

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

2. HUBUNGAN KELUARGA

| NO | NAMA DIREKSI | HUBUNGAN KELUARGA | | |
|----|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | ANGGOTA DIREKSI LAIN | DEWAN KOMISARIS | PEMEGANG SAHAM BPR |
| 1 | ANING SUNINGKAT, SE | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |
| 2 | Dra. KUSTIANI | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS**

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA per 31-12-2018 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No.88 tanggal 08 Nopember 2017 pada Notaris Sri Areni SH, MM adalah sebagai berikut :



Nama : HADY BANDONIO NITIUTOMO
Jabatan : Komisaris Utama
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/24-3-1954
Pendidikan Terakhir : Diploma Tiga
Lama Jabatan : 21 tahun tahun
Sertifikasi Komisaris : 651001210601392016
Masalaku : 2-3-2021
Pengalaman Kerja : Komisaris Utama PT. BPR Ngunut Arta Terakhir



Nama : AHMAD TRI WAHYUDI, SE
Jabatan : Komisaris
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/14-4-1966
Pendidikan Terakhir : Sarjana
Lama Jabatan : 2 tahun tahun
Sertifikasi Komisaris : 65100120619552016
Masalaku : 8-11-2021
Pengalaman Kerja : Komisaris PT. BPR Ngunut Arta Terakhir

Keterangan:

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dewan Komisaris.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap



-
- kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
3. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
4. Dengan semakin berkembangnya bisnis Bank Perkreditan Rakyat, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA posisi 31-12-2018 adalah sebagai berikut :

**PT. BPR NGUNUT ARTA****Jalan Pahlawan No.8**

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

| NO | NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS | PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS | |
|----|------------------------------|--|----------------------------|
| | | PT. BPR Ngunut Arta | Tidak memiliki group usaha |
| 1 | HADY BANDONIO NITIUTOMO | 15% | Tidak Ada |
| 2 | AHMAD TRI WAHYUDI, SE | Tidak Ada | Tidak Ada |

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2018 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

| NO | NAMA DEWAN KOMISARIS | HUBUNGAN KEUANGAN | | |
|----|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | ANGGOTA DEKOM LAIN | DIREKSI | PEMEGANG SAHAM BPR |
| 1 | HADY BANDONIO NITIUTOMO | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |
| 2 | AHMAD TRI WAHYUDI, SE | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |

2. HUBUNGAN KELUARGA

| NO | NAMA DEWAN KOMISARIS | HUBUNGAN KELUARGA | | |
|----|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | ANGGOTA DEKOM LAIN | DIREKSI | PEMEGANG SAHAM BPR |
| 1 | HADY BANDONIO NITIUTOMO | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Ada hubungan |
| 2 | AHMAD TRI WAHYUDI, SE | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan |

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Ngunut Arta posisi 31-12-2018, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Ngunut Arta adalah sebesar Rp.5.857.533, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

**PT. BPR NGUNUT ARTA****Jalan Pahlawan No.8**

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat "NGUNUT ARTA" yang telah Ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

| NO | PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH ORANG | JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000) |
|----|---|--------------|---|
| 1 | Jumlah keseluruhan gaji | 2 | 408.000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 82.139 |
| 3 | Tantiem | 2 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 2 | 0 |
| 5 | Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris | 2 | 0 |
| 6 | Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan | 0 | Mobil Dinas |
| | Total Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun | 2 | 490.139 |

2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

| NO | PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH ORANG | JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000) |
|----|---|--------------|---|
| 1 | Jumlah keseluruhan gaji | 2 | 246.000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 25.298 |
| 3 | Tantiem | 2 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 2 | 0 |
| 5 | Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris | 2 | 0 |
| 6 | Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan | 0 | - |
| | Total Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun | 2 | 271.298 |



VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2018 di PT. BPR Ngunut Arta adalah sebagai berikut :

| NO | RASIO GAJI | SKALA PERBANDINGAN | |
|----|---|--------------------|------|
| 1 | Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah | 2,85 | 1,00 |
| 2 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | 1,72 | 1,00 |
| 3 | Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah | 1,56 | 1,00 |
| 4 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi | 1,72 | 1,00 |
| 5 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi | 4,51 | 1,00 |

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2018 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA ANGGOTA DEKOM | JABATAN | JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN | JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK | JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI | PERSEN-TASE KEHADIR-AN |
|----|-------------------------|-----------------|--|---|--|------------------------|
| 1 | HADY BANDONIO NITIUTOMO | Komisaris Utama | 4 kali | 4 | 0 | 100% |
| 2 | AHMAD TRI WAHYUDI, SE | Komisaris | 4 kali | 4 | 0 | 100% |

Keterangan:

PT. BPR Ngunut Arta telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.



Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

- Pada Triwulan I target pertumbuhan Kredit Yang Diberikan tercapai 91.07% dari yang direncanakan, untuk itu perlu dipikirkan terobosan atau inovasi baru guna mempercepat pertumbuhan kredit yang diberikan sehingga melebihi dari yang sudah ditargetkan. Terutama difokuskan pada kredit jenis penggunaan yang produktif seperti modal kerja, dengan mengutamakan usaha-usaha produktif dengan resiko yang diharapkan semakin kecil dengan tidak meninggalkan prinsip ke hati-hatian.
- Pada triwulan ke II dalam rangka pemenuhan modal inti minimum BPR, akan diupayakan pemupukan modal dari laba tahun lalu yang tidak dibagikan sehingga diharapkan pada tahun 2019 sudah memenuhi ketentuan POJK 5/POJK.03/2015. Dengan komitmen bahwa pemegang saham tidak membagikan deviden sampai terpenuhinya modal inti sebesar Rp.6 milyar.
- Dalam pengembangan teknologi informasi akan disesuaikan dengan kebutuhan bank dan senantiasa melakukan penyempurnaan infrastruktur teknologi yang lebih mendekatkan bisnis kepada kebutuhan nasabah. Hal lain yang perlu dilakukan manajemen adalah selalu meningkatkan budaya kerja yang didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan sehingga dapat memberikan dampak positif pada kinerja secara optimal. Dan dalam rangka meningkatkan skill dan kualitas Sumber Daya Manusia terutama tenaga pemasaran dan tenaga administrasi, dengan merencanakan pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang ada dan merencanakan kaderisasi dan tenaga-tenaga yang lebih bisa mengikuti perkembangan IT, karena kedepan cepat atau lambat BPR (Bank Perkreditan Rakyat) harus mengikuti perkembangan IT yang sangat cepat ini.
- Pada triwulan IV membahas tentang rencana bisnis bank untuk tahun 2019 mendatang, dimana untuk Penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito diperkirakan akan ada kenaikan 10,96%, sedangkan penyaluran dana dalam bentuk Kredit Yang Diberikan diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,73% dari posisi akhir tahun sebelumnya dan laba diperkirakan juga akan ada pertumbuhan sebesar 5,42%.

**IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)**

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2018 di PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

| INTERNAL FRAUD | JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | DIREKSI | | DEWAN KOMISARIS | | PEGAWAI TETAP | | PEGAWAI TIDAK TETAP | |
| | Tahun Sebe-lumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebe-lumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebe-lumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebe-lumnya | Tahun Laporan |
| Dalam 1 (satu) tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam proses penyelesaian di internal BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2018 yang terjadi di PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

| PERMASALAHAN HUKUM | JUMLAH | |
|--|---------|--------|
| | PERDATA | PIDANA |
| Telah selesai(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 | 0 |
| Dalam proses penyelesaian | 0 | 0 |

Keterangan:

Selama tahun 2018 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.

XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT. BPR Ngunut Arta memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2018 di PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**PT. BPR NGUNUT ARTA****Jalan Pahlawan No.8**

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

| No | Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Rp. 000) | Keterangan |
|-------|---|---------|--------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | | | |
| NIHIL | | | | | | | |

Keterangan:

Dalam tahun 2018, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi



- kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
 10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
 11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Ngunut Arta sampai dengan posisi 31-12-2018 antara lain :

- Melakukan pengkinian database ketentuan yang berlaku.
- Melakukan review kepatuhan terhadap pelepasan kredit.
- Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan Baru dari regulator kepada unit kerja terkait.
- Melakukan sosialisasi peraturan internal kepada seluruh karyawan.
- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip kehati-hatian, seperti KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) dan NPL(Non Performing Loan). Sepanjang tahun 2018, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip kehati-hatian.
- Melakukan review untuk memastikan penerapan APU(Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator.
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR.
- Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya yang mudah diakses oleh karyawan.
- Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA posisi 31-12-2018, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Ngunut Arta adalah sebesar Rp.5.857.533, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.
- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Kantor kas dan seluruh



Bagian.

- Melaksanakan audit terhadap proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik.
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
- Sesuai keputusan RUPS PT. Bank Perkreditan Rakyat "NGUNUT ARTA", penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat "NGUNUT ARTA" untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas & Dewi sebagai Auditor PT. Bank Perkreditan Rakyat "NGUNUT ARTA" untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
- Laporan Keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat "NGUNUT ARTA" telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.
- Sistem pengendalian internal.
- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2018

- Komitmen terhadap OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.
- Rasio NPL (net) adalah 4.02%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net)
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah 100.29% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 12%.
- Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada



kelompok usaha.

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Ngunut Arta sampai dengan posisi 31-12-2018 meliputi:

- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat dan Kantor Kas
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan

**PT. BPR NGUNUT ARTA****Jalan Pahlawan No.8**

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Laporan Keuangan PT. BPR Ngunut Arta telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Ngunut Arta untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Adi Darmawan Erwanto sebagai Auditor PT. BPR Ngunut Arta untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Ngunut Arta dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah :

| TAHUN | NAMA KAP | NO. PERJANJIAN KERJA | MASALAKU PERJANJIAN KERJA | KAP TERDAFTAR |
|-------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 2016 | Made Sudarma Thomas & Dewi | PAU.163/TNR-MLG/XII/2015 | 31-12-2015 s.d. 31-3-2016 | Terdaftar di OJK |
| 2017 | Made Sudarma, Thomas & Dewi | PAU.689/MTD/MLG/XI/2017 | 31-1-2018 s.d. 30-4-2018 | Terdaftar di OJK |
| 2018 | Made Sudarma, Thomas & Dewi | PAU-856/MTD/MLG/XII/2018 | 10-1-2019 s.d. 10-3-2019 | Terdaftar di OJK |

3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan



- Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
 3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
 4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
 5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Ngunut Arta mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian internal

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Ngunut Arta dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

| NO | PENYEDIAAN DANA | JUMLAH | |
|----|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | DEBITUR (orang) | NOMINAL (Rp. 000) |
| 1 | Kepada Pihak Terkait | 2 | 47.500 |
| 2 | Kepada Pihak Tidak Terkait | 389 | 9.548.581 |

Keterangan:

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di



PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA.

XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PT. BPR NGUNUT ARTA TAHUN 2019

1. Meningkatkan penerapan Manajemen Risiko dan Pengawasan Audit Intern di semua bidang.
2. Mengembangkan SDM dengan kualitas yang baik yang mampu melakukan marketing funding maupun marketing landing.
3. Membangun dan mempertahankan kontinuitas penggunaan data dengan melakukan pembinaan nasabah sebagai mitra untuk kegiatan pembiayaan produktif dan konsumtif.
4. Memperkuat layanan Bank Perkreditan Rakyat dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR NGUNUT ARTA

Informasi kondisi keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan



PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

3 Laporan Keuangan Bulanan

PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR NGUNUT ARTA

PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Ngunut Arta secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Ngunut Arta pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

| NO | NAMA KEGIATAN | TUJUAN PENGGUNAAN | NILAI NOMINAL (Rp. 000) | LEMBAGA PENERIMA |
|----|-------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Pengobatan gratis | KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | 2.000.000 | masyarakat |



XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2018

| NILAI KOMPOSIT | PERINGKAT KOMPOSIT | DEFINISI PERINGKAT |
|--|---------------------------|---|
| 1,80 | Sangat Baik | PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA. |
| ANALISIS | | |
| <p>PT. Bank Perkreditan Rakyat NGUNUT ARTA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat "NGUNUT ARTA".</p> <ol style="list-style-type: none">1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap.2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.4. PT. BPR Ngunut Arta mempunyai lokasi yang strategis berada di jalan raya dan memiliki produk yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan dalam sejarah operasionalnya tidak pernah mengalami negatif issue.5. Jumlah SDM khususnya AO dan jaringan kantor masih kurang dikarenakan jumlah aset bank juga belum besar. | | |



PT. BPR NGUNUT ARTA

Jalan Pahlawan No.8

Tulungagung

Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

XVIII PENUTUP

Penerapan Tata Kelola pada PT. Bank Perkreditan Rakyat "NGUNUT ARTA" berdasarkan penilaian sendiri hasilnya adalah baik, namun demikian masih diperlukan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan dan secara terus menerus guna mencapai hasil yang lebih baik dan lebih efektif dan efisien sehingga penerapan tata kelola bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Tata kelola yang baik sangat diperlukan guna menjalankan perusahaan kedepan bisa lebih baik dan berkembang secara sehat tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian. Laporan pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Ngunut Arta selain untuk keperluan memenuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, juga dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR. Melalui laporan ini BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara manajemen dengan Stakeholders, manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi guna mencapai kinerja yang maksimal.

Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat "NGUNUT ARTA", terimakasih.

Adapun untuk penilaian selanjutnya kami serahkan kepada Pengawas dari Otoritas Jasa Keuangan.

HADY BANDONIO NITIUTOMO
Komisaris Utama

Tulungagung, 24 April 2019

Pengurus PT. BPR Ngunut Arta



ANING SUNINGKAT, SE
Direktur Utama